

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata pendidikan yang umum kita gunakan sekarang dalam bahasa arabnya adalah tarbiyah, berasal dari kata *raba-yarbu* yang berarti tambah dan bertumbuh.¹ makna ini dapat dilihat dalam firman Allah

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن
زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: Dan suatu riba (tambahan) yang kalian berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. (QS. Ar-Rum: 39).

Dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab.²

Pendidikan memegang peran penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, salah satunya adalah menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai perubahan zaman sehingga tidak terjadi

¹ Bukhari Umar, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Amzah, 2011, hlm. 21

² Hasan Basri & Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Pendidikan Islam (Jilid II)*, Bandung: Pustaka Setia, 2010, hlm. 23-24

kesenjangan antara realitas dan idealitas. Oleh karena itu tantangan zaman modern adalah dalam rangka menyadarkan umat Islam agar tergugah dan bertindak untuk mengejar dalam menguasai ilmu agama maupun umum, karena tujuan pendidikan adalah agar manusia mampu mengolah dan menggunakan segala kekayaan yang ada di langit dan di bumi untuk kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Pendidikan sendiri sebagai usaha membina dan mengembangkan aspek-aspek rohaniah dan jasmaniah yang berlangsung secara bertahap dan melalui proses tertentu, akan tetapi suatu proses yang digunakan dalam usaha pendidikan adalah proses yang terarah dan bertujuan, yaitu mengarahkan peserta didik (manusia) kepada titik optimal kemampuannya.³

Pendidikan pada hakekatnya akan mencakup kegiatan mendidik (kegiatan memberikan bekal kepada peserta didik mengenai hal-hal yang bermanfaat bagi mereka setelah dewasa kelak), mengajar (kegiatan mengorganisasi lingkungan dalam hubungannya dengan peserta didik dan bahan pengajaran yang menimbulkan proses belajar), dan melatih (kegiatan untuk membantu peserta didik, atlet mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dalam usaha mencapai prestasi/ tujuan tertentu). Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai suatu usaha untuk mentransformasikan nilai-nilai, maka dalam pelaksanaannya ketiga kegiatan tadi harus berjalan secara serempak dan terpadu, dan berkelanjutan, serta serasi dengan perkembangan peserta didik serta lingkungan hidupnya. Dengan demikian secara substansi, pendidikan dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai nilai-nilai masyarakat dan kebudayaannya.⁴

Guru mempunyai peranan penting dalam proses belajar mengajar. Artinya, bahwa dipundak guluh tugas dan tanggung jawab dalam merencanakan pengajaran, melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah, dan mengevaluasi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Tujuan akhir dari pembelajaran adalah untuk menciptakan sumber daya manusia (anak didik)

³ Khoiron Rosyadi, *Pendidikan Profetik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 135

⁴ Anas Salahudin & Irwanto Alkrienciehie, *Pendidikan Karakter (Pendidikan Berbasis Agama & Budaya Bangsa)*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, hlm. 94

yang memiliki ilmu pengetahuan, berbudi pekerti yang baik serta berguna bagi nusa dan bangsa dapat terwujud. Dengan kata lain, proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa di sekolah berhasil dengan baik, jika *output* yang dihasilkan memiliki ilmu pengetahuan luas baik untuk bekal di dunia maupun bekal di akhirat (khususnya ilmu agama), serta memiliki budi pekerti baik atau berakhlak mulia (*akhlakul karimah*) dan sebagai generasi penerus bangsa untuk membangun negara. Maka guru adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif, kognitif, maupun psikomotorik.⁵

Peran guru sebagai pendidik (*nurturer*) merupakan peran-peran yang berkaitan dengan tugas-tugas memberi bantuan dan dorongan (*supporter*), tugas-tugas pengawasan dan pembinaan (*supervisor*) serta tugas-tugas yang berkaitan dengan kedisiplinan anak agar menjadi patuh terhadap aturan sekolah, norma hidup dalam keluarga dan masyarakat. Tugas-tugas ini berkaitan dengan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak untuk memperoleh pengalaman lebih lanjut seperti penggunaan kesehatan jasmani, bebas dari orang tua dan orang dewasa lain, moralitas tanggung jawab kemasyarakatan, pengetahuan dan keterampilan dasar serta persiapan. Untuk perkawinan dan hidup berkeluarga, pemilihan jabatan, hal-hal yang bersifat personal dan spiritual. Oleh karena itu, seorang guru harus benar-benar mengemban peran dan tugasnya dengan sungguh-sungguh serta tanggung jawab. Peran guru secara pribadi yaitu (1) petugas sosial, (2) pelajar dan ilmuwan, (3) orang tua, (4) pencari teladan, (5) pencari keamanan.⁶

Dalam rangka menciptakan guru profesional yang berkinerja tinggi pada setiap lembaga pendidikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8 tentang menjadi pendidik profesional tersebut ditegaskan, "Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi,

⁵ Bukhari Umar, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Amzah, 2011, hlm. 83

⁶ Uzer Ustman, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung,: PT. Remaja Rosdakarya, 2002, hlm.

sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”.⁷ Dalam hal ini guru yang melaksanakan pekerjaan pada lembaga pendidikan wajib memiliki kualifikasi tersebut yang menjamin keahlian, kemahiran atau kecakapannya sebagai pendidik profesional. Kriteria-kriteria wajib tersebut merupakan standar mutu yang harus dipenuhi oleh guru. Profesionalitas guru yang memenuhi standar tersebut merupakan pendukung terciptanya kualitas seorang guru dalam menjalankan pekerjaannya. Salah satu syarat untuk menjadi guru wajib mempunyai kompetensi. *Pertama*, pengetahuan (*knowledge*), yaitu kesadaran dalam bidang kognitif. *Kedua*, pemahaman (*understanding*), yaitu kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki individu. *Ketiga*, keterampilan (*skill*), yaitu sesuatu yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya. *Keempat*, nilai, yaitu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologi telah menyatu pada diri seseorang. *Kelima*, sikap, yaitu perasaan. *Keenam*, minat (*interest*), yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.⁸

Terciptanya kualitas kinerja guru yang profesional di sekolah membutuhkan dukungan peran kepala sekolah yang kompeten sebagai *leader* dan *manager*. Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kepala sekolah mempunyai pengaruh dalam memajukan pendidikan di sekolah masing-masing dengan memberikan motivasi kepada guru untuk lebih bersemangat dalam proses pembelajaran melalui empati dan kecakapan sosial yang dimiliki seseorang kepala sekolah dapat membangkitkan motivasi guru sehingga memahami mengajar bukan tuntutan profesi semata namun lebih terpenting adalah mengajar bagian dari ibadah yang harus dilakukan dengan penuh keikhlasan. Kepala sekolah merupakan motor penggerak penentu arah kebijakan sekolah, yang akan menentukan bagaimana tujuan-tujuan sekolah dan pendidikan pada umumnya direalisasikan. Sebagai pemimpin, kepala

⁷ Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

⁸ Kusnandar, *Guru Profesional*, Rajawali Pers, 2011, hlm. 53

sekolah harus mengetahui, memahami semua hal yang berkaitan dengan administrasi sekolah dan potensi yang dimiliki oleh para gurunya, sehingga komunikasi dengan guru dan karyawan sekolah akan membantu kinerjanya.⁹

Sistem dalam sekolah pada umumnya kepala sekolah menempati posisi yang istimewa. Menjadi kepala sekolah tidak mudah, membutuhkan waktu, tenaga dan pikiran yang ekstra dibanding guru-guru pengampu. Sebagai aktivitas publik kepala sekolah merupakan figur utama sekolah, aktivitas tindakannya mencerminkan apa yang akan dicapai sehingga dengan demikian kepala sekolah memegang peranan penting dalam segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas sekolah ke dalam maupun keluar, maka dari itu dalam struktur organisasi sekolahpun, kepala sekolah biasanya selalu ditempatkan yang paling atas karena ialah sebagai pemimpin jalannya sistem yang ada di sekolah. Secara sederhana kepemimpinan diartikan sebagai pelaksana otoritas dan perbuatan keputusan. Pengertian tersebut menunjukkan bagaimana seorang pemimpin mampu menggunakan kewenangannya untuk menggerakkan organisasi melalui keputusan yang dibuat. Pengertian yang lebih populer menunjuk pada keharmonisan interaksi antara pimpinan dengan bawahan sehingga kewenangan yang dimiliki oleh seorang pemimpin diimplementasikan dalam bentuk pembimbingan dan pengarahan terhadap bawahan. Menurut Soekarto Indrafachrudi dkk, kepemimpinan adalah kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk memengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, dan jika perlu memaksa orang lain untuk menerima pengaruh itu dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu pencapaian tujuan-tujuan tertentu.¹⁰

Kemajuan sekolah sangat tergantung pada sosok pemimpinnya, yakni kepala sekolah. Sebab, kepala sekolahlah yang berada di garda depan untuk menggerakkan kegiatan dan menetapkan target sekolah. Keputusan-keputusan penting yang berdampak besar bagi organisasi (sekolah) terlahir darinya. Maka, eksistensi dan fungsi kepala sekolah sangat penting untuk dikaji,

⁹ Tatang, *Supervisi Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2016, hlm. 87

¹⁰ Hasan Basri & Tatang, *Kepemimpinan Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2015, hlm.

dirumuskan dan dikembangkan guna memenuhi harapan publik akan terwujudnya lembaga pendidikan yang berkualitas. Profesionalitas kepala sekolah menjadi syarat mutlak terwujudnya sekolah yang berdaya saing tinggi. Kalau kepala sekolah yang memimpin organisasi pasif, apatis, dan miskin ide, maka sekolah akan mengalami kemunduran drastis. Disinilah urgensinya mengembangkan kualitas kepala sekolah agar mampu memimpin sekolah secara dinamis, komprehensif dan produktif sesuai tantangan zaman.¹¹ Betapa perlunya kualitas kepemimpinan kepala sekolah, maka selalu ditekankan pentingnya tiga kemampuan dasar yang perlu dimiliki oleh kepala sekolah, yaitu: *conceptual skills, human skills dan technical skills*.¹²

Tantangan kompetisi yang sangat tinggi pada era globalisasi saat ini mengharuskan sekolah untuk memanfaatkan seluruh sumber dayanya agar mampu bersaing dan memenangkan persaingan itu. Tidak boleh ada apatisme, pasivisme, dan fatalisme. Kreativitas, daya inovasi, dan produktivitas harus menjadi ruh organisasi sekolah. Kepala sekolah, sebagai sosok manajer dan *leader*, mempunyai tanggung jawab besar untuk menggerakkan perubahan yang sesuai dengan semangat besar ini. Langkah awal yang ditempuh kepala sekolah untuk mewujudkan visi besar sekolah adalah meningkatkan kinerja. Kinerja ialah kesungguhan usaha yang dilakukan seseorang, yang berdampak pada hasil yang diperoleh. Menurut Khaerul Umam, kinerja merupakan suatu yang lazim digunakan untuk memantau produktivitas kerja sumber daya manusia, baik yang berorientasi pada produksi barang, jasa, maupun pelayanan.¹³

Salah satu perubahan yang mendasar dalam organisasi pendidikan adalah sistem manajemen yang sentralistis diganti dengan sistem manajemen desentralistis melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini menuntut perubahan berbagai komponen dalam

¹¹ Jamal Ma'mur Asmani, *Tips Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, Yogyakarta; Diva Press, 2012, hlm. 15-16

¹² Wahjosumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah*, cet. ke-4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 349

¹³ Khaerul Umam, *Perilaku Organisasi*, Bandung: Pustaka Setia, 2010, hlm. 187

organisasi dan juga gaya kepemimpinan. Artinya, dalam situasi yang tidak menentu, penuh dengan perubahan dan ketidakpastian diperlukan keahlian manajerial yang baik, sekaligus dapat mengembangkan keahliannya dalam bidang kepemimpinan. Terdapat tiga jenis kepemimpinan yang dipandang *representative* dengan tuntutan era desentralisasi, yaitu kepemimpinan transaksional, kepemimpinan transformasional, dan kepemimpinan visioner. Ketiga tipe kepemimpinan ini memiliki titik konsentrasi yang khas sesuai dengan jenis permasalahan dan mekanisme kerja yang diserahkan pada bawahan.¹⁴

Fokus pada penelitian ini pada tipe kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional dipandang sebagai *contingent reinforcement* atau dorongan kontingen dalam bentuk *reward* dan *punishment* yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja, yaitu manakala para staf menunjukkan keberhasilan ataupun kemajuan dalam mencapai sasaran target yang diharapkan, mereka mendapatkan *contingent* positif berupa imbalan. Namun, apabila staf menunjukkan kinerja sebaliknya, yaitu menunjukkan kegagalan atau ditemukan berbagai kesalahan maka dorongan *contingent* negatif atau *aversif* dapat dikenakan berupa hukuman yang telah disepakati. Pemimpin bercirikan transaksi, enggan membagi pengetahuannya kepada staf karena menganggap pengetahuan tersebut dapat dijadikan alat koreksi atau menjadi pengkritik moral yang kuat bagi perbaikan iklim kerja yang terlalu berorientasi tugas dan sedikit mengabaikan aspek-aspek kepribadian manusia.¹⁵ Berdasarkan definisi di atas gaya kepemimpinan transaksional adalah kemampuan mengidentifikasi keinginan bawahan dan membantunya mencapai tingkat prestasi yang lebih tinggi dengan memberikan imbalan yang memuaskan. Proses tersebut disertai pula dengan kejelasan tentang penyelesaian pekerjaan dan besarnya imbalan yang akan diterima.

SDIT Al Islam Kudus, yang terletak di Jl. veteran desa gelantengan kecamatan kota kabupaten kudus merupakan salah satu sekolah unggulan yang

¹⁴ Aan Komariah dan Cepi Triatna, *Visionary Leadership Menuju Sekolah Efektif*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008, hlm. 74-75

¹⁵ *Ibid*, hlm. 77

mempunyai kepemimpinan kepala sekolah yang menonjol. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya dalam hal manajemen sekolah, dan kualitas guru. Berdasarkan survei yang dilakukan gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala sekolah belum optimal sehingga kualitas guru kurang maksimal tanpa ada pengawasan langsung dari kepala sekolah. Pengawasan langsung dapat mempengaruhi kinerja guru, apabila terdapat kesalahan kerja kepala sekolah bisa langsung menegur dan guru akan segera memperbaiki kesalahan tersebut, sehingga tepat waktu dalam menyelesaikan tugasnya. Komunikasi yang efektif antara kepala sekolah dan guru masih harus ditingkatkan agar perintah dapat dijalankan dengan baik, komunikasi yang baik antara kepala sekolah dan guru mempengaruhi hasil kerja guru, karena perintah yang jelas akan menghindarkan guru dari kesalahan melaksanakan tugas.¹⁶ Berdasarkan latar belakang dan keadaan tersebut di atas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dan menyusun skripsi dengan mengangkat judul *“Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transaksional Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru Pada Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Islam Kudus Tahun 2016/2017”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana gaya kepemimpinan transaksional kepala sekolah SDIT Al Islam Kudus pada tahun 2016/2017?
2. Bagaimana kinerja guru di SDIT Al Islam Kudus pada tahun 2016/2017?
3. Apakah ada pengaruh antara gaya kepemimpinan transaksional kepala sekolah dengan kinerja guru di SDIT Al Islam Kudus pada tahun 2016/2017?

¹⁶ Hasil Observasi, pada tanggal 25 Februari 2017

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan ditempuh dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui gaya kepemimpinan transaksional kepala sekolah SDIT Al Islam Kudus
2. Untuk mengetahui kinerja guru di SDIT Al Islam Kudus
3. Untuk mengetahui pengaruh antara gaya kepemimpinan transaksional kepala sekolah dengan kinerja guru di SDIT Al Islam Kudus

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini, secara kongkrit dapat dikategorikan menjadi dua manfaat yaitu: manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kedua manfaat tersebut dipaparkan sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoretis

Secara teoretis penelitian diharapkan dapat memberi masukan pengalaman dan khasanah perbendaharaan keilmuan yang baru bagi peneliti, khususnya dibidang kepemimpinan kepala sekolah dalam rangka meningkatkan kinerja guru. Manfaat lain yang dapat diambil adalah dapat mengembangkan konsep yang telah ada dalam disiplin keilmuan untuk meningkatkan kinerja guru sehingga berguna bagi pengembangan ilmu.

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi berbagai pihak, antara lain:

- a. Bagi sekolah

Sebagai bahan masukan bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas sekolahnya, khususnya dalam kinerja guru sekolah dasar dengan menerapkan gaya kepemimpinan transaksional kepala sekolah.

- b. Bagi Kepala Sekolah

Penelitian ini sebagai sumber informasi dengan mempertimbangkan berbagai indikator keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan di sekolah, berkaitan pentingnya peran kepala sekolah, di mana

persepsi terhadap pola kepemimpinannya dapat mempengaruhi kinerja.

c. Bagi Guru

Bagi guru sekolah dasar agar dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Memberi pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti selanjutnya setelah melakukan penelitian ini. Serta sebagai bekal buat peneliti, untuk dapat menerapkan gaya kepemimpinan transaksional kepala sekolah dalam kelompoknya saat sudah menjadi guru (kepala sekolah) nantinya sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

